

DISKUSI PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN DIFUSI INOVASI PEMERINTAHAN DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA

* **Ranggi Ade Febrian¹, Yendri Nazir², Solahuddin Ismail³, Nia Audania⁴, Muhammad Paizal⁵**

^{1,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

² Schools of Government Universiti Utara Malaysia

^{4,5} Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

*Corresponding Author: ranggi.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Kebaruan politik dipandang sebagai salah satu cara terbaik untuk menjembatani kesenjangan yang ada dalam lanskap politik negara saat ini dalam upaya menyukseskan keinginan Malaysia untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi, selain mewujudkan visi negara pada tahun 2020. Tulisan ini akan melihat prioritas penciptaan kebaruan politik dalam lanskap politik nasional dengan melihat apakah hal tersebut merupakan bentuk keinginan atau keharusan dalam mengubah cara berpikir, serta pendekatan politisi terhadap politik seperti sistem demokrasi di Malaysia. Kebaruan politik ditonjolkan untuk menemukan ide-ide kreatif guna memperbaiki sistem politik di Malaysia. Sebab, pola politik di Malaysia memerlukan perubahan paradigma menuju tata kelola politik yang kompetitif, lebih matang, dan terbuka sesuai modelnya sendiri. Hal ini agar segala keputusan yang diambil mengutamakan rakyat. Kebaruan politik memungkinkan politik beradaptasi dengan perkembangan peradaban manusia di abad ke-21. Pengabdian ini berlangsung di Negara Bagian Kedah dengan sasaran kelompok masyarakat dan tokoh desa. Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion dengan memaksimalkan pertukaran informasi, strategi pembangunan, best practice inovasi pemerintah sebagai pembanding dan menyerap aspirasi kelompok sasaran dalam pengembangan inovasi di Negara Bagian Kedah. Eksternal PkM ini terdiri dari eksternal wajib berupa laporan PkM dan bahan ajar pada mata kuliah Inovasi Pemerintahan. Sedangkan penambahan eksternalnya adalah publikasi pada jurnal PkM. PkM ini terdiri dari dosen-dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan bekerjasama dengan dosen-dosen Universiti Utara Malaysia untuk memperkenalkan inovasi berbasis teknologi informasi melalui pengembangan website untuk masyarakat di Negara Bagian Kedah Malaysia.

Kata Kunci : Perkembangan, Demokrasi, Inovasi, Pemerintahan, Malaysia

Abstract

Political novelty is seen as one of the best ways to bridge the gaps that exist in the country's current political landscape in an effort to succeed Malaysia's desire to achieve high-income country status, in addition to realizing the country's vision by 2020. This paper will look at the priority of creating political novelty in the national political landscape by looking at whether it is a form of desire or necessity in changing the way of thinking, as well as politicians' approach to politics such as the democratic system in Malaysia. Political novelty is highlighted to find creative ideas to improve the political system in Malaysia. This is because the political pattern in Malaysia requires a paradigm shift towards competitive, more mature and open political governance according to its own model. This is so that all decisions taken prioritize the people. Political novelty allows politics to adapt to the development of human civilization in the 21st century. This service took place in Kedah State with the target community groups and village leaders. The method used is Focus Group Discussion by maximizing the exchange of information, development strategies, best practice of government innovation as a comparison and absorbing the aspirations of the target group in the development of innovation in Kedah State. External PkM consists of mandatory externals in the form of PkM reports and teaching materials in Government Innovation courses. While the additional external is publication in the PkM journal. This PkM consists of lecturers of the Government Science Study Program and collaborates with lecturers from Universiti Utara Malaysia to introduce information technology-based innovation through website development for the community in Kedah State Malaysia.

Keywords: Development, Democracy, Innovation, Government, Malaysia



PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini didapati semakin terpuruk dengan sistem demokrasi yang ada dan pola politik para politisi, apapun partainya. Bagi masyarakat, cara dan cara yang dilakukan sejak pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955, hingga saat ini sudah ketinggalan zaman. Mereka berharap perubahan akan dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi negara dan menarik lebih banyak pemilih untuk memilih pada pemilu. Oleh karena itu, beberapa pihak berinisiatif memberikan saran kepada pemerintah agar dapat berperan lebih aktif dalam mendorong proses demokratisasi yang baik di Malaysia (Razak et al., 2019). Salah satu contoh yang paling populer adalah NET 3.0 Gathering yang diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 28 April lalu.²⁷ Sebelumnya mereka telah melakukan serangkaian pertemuan dengan tujuan yang sama, yaitu BERSIH Gathering dan BERSIH Gathering 2.0.

Misalnya, Barisan Nasional (BN) yang selalu yakin akan kemenangan di tangannya, masih menggunakan paradigma perjuangan lama dalam manifesto pemilunya dengan menjadikan pembangunan sebagai pilar atau landasan perjuangannya. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa generasi Melayu yang lahir dari Kebijakan Ekonomi Baru (DEB) tidak melihat pembangunan material sebagai platform kampanye yang penting. Mereka malah fokus pada persoalan pembangunan non-materi seperti bahasa Melayu yang tidak lagi menjadi bahasa pengantar mata pelajaran MIPA, peradilan, peradilan, persoalan korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan bagi masyarakat non-Melayu, mereka lebih memilih melihat pada hal-hal yang bersifat non-ekonomi, antara lain persoalan supremasi Melayu, Islam, dan kebudayaan. (Nadzri, 2018)

Dampak langsung dari kekesalan terhadap penerimaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada dan cara berpolitik yang sudah ketinggalan zaman berdampak besar pada GE ke-12 yang berlangsung pada Maret 2008. (Suaedy, 2016) Saat itu, BN yang diberi mandat untuk memerintah negara yang sejak tahun 1955 sebagai Partai Aliansi, harus berdamai dengan tsunami politik yang melanda negara tersebut menyaksikan perubahan besar terjadi pada sistem demokrasi Malaysia yang tidak banyak mengalami perubahan sejak tragedi rasial terjadi pada 13 Mei 1969. Hasil GE ke-12 melihat BN hanya mampu meraih mayoritas tipis dibandingkan oposisi di tingkat Parlemen. Di tingkat DPR Sedangkan di tingkat negara bagian, BN kehilangan empat negara bagian, yakni Selangor, Perak, Penang, dan Kedah. Sementara Kelantan tetap menjadi kubu PAS. Setelah itu, perlu dilakukan suatu kebaruan politik untuk mengubah sistem demokrasi negara dan mengubah pola lama para politisi dalam berpolitik agar dapat membangkitkan kembali minat masyarakat untuk memilih dalam memilih partai atau pemimpin yang benar-benar layak untuk berkuasa. dan mewakili suara mereka di Parlemen atau Dewan Legislatif Negara Bagian.

Perubahan yang dilakukan diyakini mampu mengubah persepsi masyarakat sekaligus menerima cara baru dalam berpolitik yang tidak membosankan atau mengganggu. Hal ini dikarenakan, kebaruan politik menekankan imajinasi manusia dalam hal keyakinan, tindakan dan perbuatan. Bagi masyarakat, kampanye politik yang didasarkan pada ancaman atau janji sudah tidak lagi menjadi pola politik yang efektif di dunia yang modern dan canggih saat ini. (Party et al., 2012)

Untuk itu, tulisan ini akan mengevaluasi apakah kebaruan politik diperlukan di Malaysia dalam upaya mengubah sistem demokrasi dan politik negara tersebut, atau sekadar sebuah bentuk keinginan dalam mewujudkan keinginan para aktor politik untuk tetap menjabat dan memerintah negara. (Razak et al., 2019) Pengabdian ini berlangsung di Negara Bagian Kedah dengan sasaran kelompok masyarakat dan tokoh desa. Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion dengan memaksimalkan pertukaran



informasi, strategi pembangunan, best practice inovasi pemerintah sebagai pembanding dan menyerap aspirasi kelompok sasaran dalam pengembangan inovasi di Negara Bagian Kedah. Eksternal PkM ini terdiri dari eksternal wajib berupa laporan PkM dan bahan ajar pada mata kuliah Inovasi Pemerintahan. Sedangkan penambahan eksternalnya adalah publikasi pada jurnal PkM. PkM ini terdiri dari dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan kerjasama dengan dosen Universiti Utara Malaysia untuk memperkenalkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

METODE PELAKSANAAN

Melihat skenario sistem demokrasi dan sistem politik yang diterapkan di Malaysia, penting bagi kita untuk mengidentifikasi apakah kebaruan politik ini merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan atau sekedar keinginan untuk kelangsungan hidup para aktor di kedua sistem tersebut. Penting untuk memastikan adanya perubahan paradigma menuju tata kelola politik yang lebih kompetitif dan profesional dalam mendorong negara menuju pencapaian status negara berpendapatan tinggi dan mewujudkan visi negara pada tahun 2020. Uraian lengkap mengenai metode pelaksanaannya bagian untuk memecahkan masalah berdasarkan langkah-langkah berikut:

- 1) Bagi Mitra yang bergerak dalam bidang perekonomian produktif dan mengarah pada perekonomian produktif, cara pelaksanaan yang dilakukan mitra antara lain pada PkM ini tidak dilakukan karena fokus pada kebaruan politik di Negara Bagian Kedah.
- 2) Cara pelaksanaannya dilakukan dengan tiga cara, yaitu: Pertama, dialog interaktif (Pradnyawati et al., 2022) dengan pemerintah Negara Bagian Kedah dan kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan manajemen inovasi pemerintah. Hasil dialog interaktif ini akan diidentifikasi untuk memetakan permasalahan ke dalam konten website yang akan direncanakan. Kedua, perencanaan website dan media sosial oleh anggota tim IT PkM yang berkompeten. Ketiga, sosialisasi penggunaan kepada sasaran pemerintah dan kelompok masyarakat. Dengan tiga tahapan penyelesaian tersebut diharapkan target IKU PkM dapat tercapai dan menjawab permasalahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan inovasi.
- 3) Untuk menghadapi mitra PkM non produktif dalam hal ini adalah mitra yang tidak mampu dalam hal pengelolaan, maka langkah yang dilakukan adalah, pertama memberikan bantuan berupa konsultasi, dan memberikan contoh best practice pengelolaan inovasi.
- 4) Keikutsertaan mitra dalam pelaksanaan program adalah dengan menyediakan wadah pertemuan dialog interaktif seperti mengundang warga, pemerintah negara bagian, dan membantu menyiapkan makanan ringan untuk kegiatan dialog interaktif, membantu menyiapkan sarana dan prasarana dialog serta membantu untuk mendokumentasikan kegiatan PkM. (Alfansyur & Mariyani, 2020)
- 5) Evaluasi pelaksanaan program dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, serta bersilaturahmi dengan mitra untuk memberikan informasi hasil setelah PkM dilaksanakan.
- 6) Tugas tim dalam kegiatan PkM adalah:
 - a) Ketua Tim bertugas merencanakan proposal PkM, membina komunikasi dengan mitra, mengatur posisi tim, melakukan tinjauan pustaka, melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam kotak dialog, menyusun konsep konten yang akan dibuat pada Website.
 - b) Anggota tim khusus dari dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, bertugas memetakan permasalahan, merancang Website.
Mahasiswa bertugas membantu teknis pengetikan laporan, mengantarkan surat kepada mitra, membantu observasi lapangan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pemetaan Masalah Dari Hasil Focus Group Discussion (FGD)

Masyarakat Malaysia sangat membutuhkan perubahan yang akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi yang ada. Dari sudut pandang partai politik, konteks kemauan perlu ada untuk memperbaiki struktur gaya demokrasi yang akan menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Malaysia sudah berada pada level yang matang. Dari proyeksi yang telah disempurnakan, menurut Mohd Arif Atan (2009), Pemilu ke-12 tidak hanya akan membawa tsunami politik bagi Barisan Nasional (BN) namun juga dikhawatirkan akan berdampak pada masa depan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Melayu. Dengan demikian jelas menunjukkan keheranan bahwa tingkat sistem demokrasi hanya menjadi sebuah mitos yang mengakibatkan dukungan terhadap kaum Melayu semakin lemah dan terarah pada partai-partai non-Melayu. Kelupaan dalam sistem demokrasi menunjukkan adanya dukungan generasi muda yang semakin memberontak dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

Dukungan pemuda saat ini, merupakan suatu tren yang sulit diperbaiki karena kelemahan akibat sosialisasi “tidak apa-apa” dengan berbagai cara yang tidak memperhatikan kesejahteraan dan hak-haknya. Gelombang pemuda ini mencari stabilitas di menit-menit terakhir dengan mengembalikan peluang cerah kepada lawan. Meledakkan keinginan mereka untuk mencari stabilitas dengan menaruh harapan pada partai oposisi sehingga menciptakan harapan baru di Malaysia. Menurut Dzulkifli Ahmad (2009) berdasarkan model ekonometrik, rata-rata swing or misstep pada tingkat parlemen di semenanjung Malaysia jika dibandingkan dengan Pemilu ke-11 tahun 2004, Melayu 5,13%, Tionghoa 56,26%, dan India meningkat menjadi 69,09%. Angka ayunan ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap demokrasi di Malaysia sudah jelas. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keinginan untuk melakukan kebaruan politik di Malaysia merupakan sebuah mekanisme yang perlu ada saat ini.

Setelah hampir 55 tahun meraih kemerdekaan dari penjajah, kini saatnya Malaysia menerapkan kebaruan politik yang lebih fokus pada sistem demokrasi negaranya dan juga pola praktik politik di negara tersebut. Sebelumnya, Malaysia terkesan menerapkan budaya politik yang tidak berpusat pada budaya tanah air Malaysia. Malaysia dinilai menerapkan budaya politik yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran yang selama ini dibanggakannya. Yang pasti, buruknya budaya politik telah menjangkiti jiwa para pemain – pemain politik di Malaysia. Akibatnya, mereka rela menggunakan politik kotor hanya untuk mendapatkan keuntungan politik dengan cepat.

Kebaruan politik perlu segera diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Diantaranya, kebaruan politik perlu diterapkan melalui sistem pendidikan. Melalui pendidikan, anak-anak di tingkat sekolah perlu dididik dan ditanamkan nilai-nilai murni dalam pembelajaran sehari-hari, khususnya pada aspek kepemimpinan. Pemahaman pada tahap awal ini diperlukan agar mereka memiliki pemahaman awal mengenai budaya kepemimpinan bestari jika mereka menjadi pemimpin di masa depan. Selain itu, cocok juga diterapkan pada jenjang pendidikan tinggi. Pemuda atau mahasiswa Institut Pendidikan Tinggi (IPT) merupakan jantung pembangunan negara di masa depan. Lebih dari itu, mereka lah yang akan memimpin kepemimpinan negara di masa depan. Oleh karena itu, budaya politik yang positif perlu menjadi landasan dalam mengembangkan potensi kepemimpinan mereka ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Berikut dokumentasi hasil FGD terkait diskusi dengan mitra dan masyarakat di Negeri Kedah Malaysia :





Sumber : Dokumentasi PkM Di Negeri Kedah, Malaysia 2023

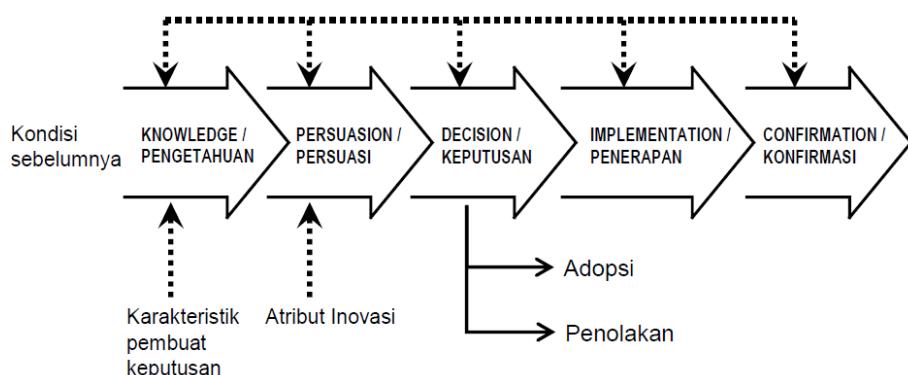
2) Solusi Permasalahan

Istilah kebaruan politik merupakan sesuatu yang baru dalam sistem politik dan demokrasi Malaysia. Meski telah disebutkan dan diusulkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili, namun masih belum ada implementasi khusus untuk mewujudkannya. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PkM ini adalah:

- a) Menurut Chamber Dictionary Edisi Keempat, inovasi berarti sesuatu yang baru diperkenalkan seperti metode baru, adat istiadat dan lain-lain. Bahkan istilah inovasi juga disebutkan sebagai salah satu nilai aspirasi dalam Idea 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak pada tahun 2009. Budaya inovasi (Wardono & Ekawati, 2014) menunjukkan kemauan untuk berubah, serta mencoba hal dan cara baru dalam hidup. Dari segi konsep mencakup kreativitas dan inovasi yang menjadi motor penggerak pertumbuhan di segala bidang. Inovasi juga mencakup perbaikan dan adaptasi terhadap kreativitas yang ada untuk memberikan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan.
- b) Sedangkan inovasi, mampu mempengaruhi negara, negara bagian dalam suatu negara, dan organisasi serta organisasi sosial yang sebagian besar terlibat dengan isu-isu yang berkaitan erat dengan masyarakat. Diantaranya, model politik demokrasi, kebijakan kesejahteraan, pendidikan dan peraturan perundang-undangan Nasional. Inovasi juga mampu mengembalikan kualitas hidup individu, selain memperbaiki struktur organisasi dan sosial. (Prasetyo Galih Antonius & Suripto, 2014)
- c) Mengembangkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi nasional yang dianut sejak Malaya memperoleh kemerdekaan dari pemerintah Inggris, kemudian setelah terbentuknya Malaysia pada tahun 1963, masih tetap utuh hingga saat ini. Ini masih merupakan sistem politik terbaik. Dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin dilakukan melalui pemilu yang menantang atau sistem demokrasi yang mempraktikkan pemilu yang bebas dan adil. Sistem ini masih dipraktikkan hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan sesuatu dalam upaya mendewasakan demokrasi di Malaysia. Hal ini termasuk meningkatkan dan memperluas keterlibatan generasi muda dan pemuda dalam sistem demokrasi negara. (Jazimin Zakaria & Sity Daud, 2018)
- d) Meminimalkan konflik sosial. Barat memandang politik di Malaysia berfokus pada pluralisme politik (Hilmi et al., 2019) yang juga merupakan ciri sistem politik negara tersebut. Ada tiga etnis berbeda yang masing-masing memiliki institusi

politiknya sendiri. Situasi ini menyebabkan para ilmuwan sosial barat terpesona dan tertarik dengan konflik dan perpecahan politik yang ada di Malaysia. Malaysia adalah negara dengan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai ras dan kebangsaan. Namun pluralisme tersebut dipandang sebagai bentuk provokasi yang muncul akibat percampuran etnis di Malaysia.

Model inovasi menurut Everett Rogers (1964) melihat keputusan inovasi dalam konteks individu yang berbeda dengan proses keputusan organisasi. (Hietala, 1983). Meskipun sebagian besar proses pengambilan keputusan individu di sektor publik dan sektor bisnis berbeda, untuk produk tertentu, keputusan individu dalam mengadopsi inovasi di kedua sektor tersebut serupa. Kondisi serupa juga terjadi pada keputusan inovasi yang dilakukan organisasi, dimana keputusan untuk mengadopsi suatu produk inovatif diambil oleh sekelompok orang atau secara kolektif. Tahapan pengambilan keputusan inovasi dalam konteks individu seperti tergambar pada grafik berikut:



Sebagai contoh operasional model ini pada tahap pengetahuan adalah tahap dimana konsumen/pasar (di sektor bisnis) atau warga negara (di sektor publik) mulai mengenal dan sadar akan produk inovasi yang baru saja diluncurkan di pasar. . Proses penyadaran ini diawali dengan kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh para pemasar. Oleh karena itu peran media massa sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif dari pasar/warga terhadap kehadiran produk tersebut.

Adapun target atau capaian yang ingin dicapai adalah terciptanya 1 dialog interaktif dengan pemerintah negara dan kelompok masyarakat yang sadar akan inovasi. Target selanjutnya pada bulan ke 4 sudah direncanakan penerapan WEBSITE Negeri Kedah. Melalui kegiatan PkM tim penyusun yang terdiri dari 2 (dua) program studi yaitu Prodi Ilmu Pemerintahan dan Prodi Teknik Informatika tentunya dapat memperkaya aspek keilmuan tim penyusun khususnya di bidang Teknologi Informasi Pemerintahan. kursus yang diajarkan oleh ketua tim, dan Kursus Perbandingan Pemerintahan yang dimaafkan oleh anggota tim. Sehingga diharapkan PkM ini dapat menghasilkan tambahan eksternalitas berupa publikasi jurnal baik secara nasional maupun internasional

SIMPULAN

Kebaruan politik dipandang sebagai salah satu cara terbaik untuk menjembatani kesenjangan yang ada dalam lanskap politik negara saat ini dalam upaya menyuksekan keinginan Malaysia untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi, selain mewujudkan visi negara. pada tahun 2020. Tulisan ini akan melihat prioritas penciptaan kebaruan politik dalam lanskap politik nasional dengan melihat apakah hal tersebut merupakan bentuk keinginan atau keharusan dalam mengubah cara berpikir, serta pendekatan politisi terhadap politik. seperti sistem demokrasi di Malaysia. Kebaruan

politik ditonjolkan untuk menemukan ide-ide kreatif guna memperbaiki sistem politik di Malaysia. Sebab, pola politik di Malaysia memerlukan perubahan paradigma menuju tata kelola politik yang kompetitif, lebih matang, dan terbuka sesuai modelnya sendiri. Hal ini agar segala keputusan yang diambil mengutamakan rakyat. Kebaruan politik memungkinkan politik beradaptasi dengan perkembangan peradaban manusia di abad ke-21. Pengabdian ini berlangsung di Negara Bagian Kedah dengan sasaran kelompok masyarakat dan tokoh desa. Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion dengan memaksimalkan pertukaran informasi, strategi pembangunan, best practice inovasi pemerintah sebagai pembanding dan menyerap aspirasi kelompok sasaran dalam pengembangan inovasi di Negara Bagian Kedah.

Tulisan ini mengevaluasi apakah kebaruan politik diperlukan di Malaysia dalam upaya mengubah sistem demokrasi dan politik negara tersebut, atau sekadar sebuah bentuk keinginan dalam mewujudkan keinginan para aktor politik untuk tetap menjabat dan memerintah negara. Masyarakat Malaysia sangat membutuhkan perubahan yang akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi yang ada. Dari sudut pandang partai politik, konteks kemauan perlu ada untuk memperbaiki struktur gaya demokrasi yang akan menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Malaysia sudah berada pada level yang matang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih memungkinkan Anda mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan terutama kepada Rektor Universitas Islam Riau dan mitra pengabdian masyarakat internasional yaitu Schools Government Universiti Utara Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Hietala, M. (1983). The diffusion of innovations: Some examples of finnish civil servant's professional tours in Europe. *Scandinavian Journal of History*, 8(1–4), 23–36. <https://doi.org/10.1080/03468758308579015>
- Hilmi, E. E., Salleh, K., & Nur Farhana, A. R. (2019). Faktor-faktor Pengaruh Penyebaran Pluralisme Agama di Malaysia. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 2(1), 99–110. <http://www.bitarajournal.com>
- Jazimin Zakaria, & Sity Daud. (2018). Menelusuri Pendemokasian Di Malaysia : Impak Terhadap Pencapaian Intergasi Nasional. *E-Academia Journal*, 7(1), 1–14.
- Nadzri, M. M. N. (2018). The 14th General Election, the Fall of Barisan Nasional, and Political Development in Malaysia, 1957-2018. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(3), 139–171. <https://doi.org/10.1177/186810341803700307>
- Party, J., Anw, U., Ku, K., Ibrahim, A., Keadilan, P., Sahrasad, H., Islam, P. S., Paramadina, U., & Kalijaga, U. I. N. S. (2012). Oposisi Anwar Ibrahim. I(2).
- Pradnyawati, L. G., Ratna Juwita, D. A. P., Indra Wijaya, M., Hegard Sukmawati, N. M., & Eka Pratiwi, A. (2022). Program kemitraan masyarakat pencegahan stunting di Desa Kerta, Kecamatan Payangan. *Warmadewa Minesterium Medical Journal*, Vol.1 No.2(2), 50–55. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wmmj/article/view/4978/3589>
- Prasetyo Galih Antonius, & Suripto. (2014). *Handbook Inovasi Administrasi Negara*

- Lembaga Administrasi Negara (*Pusat Intan-Dian-Lan*) (Vol. 1). www.inovasi.lan.go.id
- Razak, S. A., Azlan, A. A., & Abdul Jalil, A. F. (2019). Pilihan Raya Umum Ke-14 di Malaysia: Berakhirnya Era Rejim Autoritarian. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 4(2), 90–101.
- Suaedy, A. (2016). Islam, Identitas dan Minoritas di Asia Tenggara. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(2), 237–252.
- Wardono, D. T., & Ekawati, A. (2014). Riki Yakub 1. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2, 735–747.